



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 - b. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
14. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah, lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.

19. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain - Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.241.843.665.826,00 bertambah sebesar Rp.702.684.810.144,00 sehingga menjadi Rp.2.944.528.475.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 2.165.586.622.026,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 81.978.861.880,00

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp. 2.247.565.483.906,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 2.241.843.665.826,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 702.684.810.144,00

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp. 2.944.528.475.970,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp. 88.432.043.800,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 620.705.948.264,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 709.137.992.064,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 12.175.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 12.175.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp. 696.962.992.064,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. PAD

1. Semula Rp. 122.668.622.026,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.673.022.360,00)

Jumlah PAD	
Setelah Perubahan	Rp. 113.995.599.666,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp. 2.015.640.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 68.719.866.583,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah Perubahan	Rp. 2.084.359.866.583,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 27.278.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.932.017.657,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Setelah Perubahan	Rp. 49.210.017.657,00

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1. Semula	Rp. 27.637.760.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.649.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah	
Setelah Perubahan	Rp. 30.286.760.000,00
b. Retribusi Daerah;	
1. Semula	Rp. 5.616.430.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.448.382.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah	
Perubahan	Rp. 4.168.048.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	
Daerah Setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah;	
1. Semula	Rp. 84.414.432.026,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 9.873.640.360,00)</u>
Jumlah Lain-Lain PAD	
Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 74.540.791.666,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp. 1.805.640.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 28.119.972.517,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp. 1.777.520.027.483,00
b. Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp. 210.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 96.839.839.100,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp. 306.839.839.100,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
a. Semula	Rp. 27.278.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.932.017.657,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp. 49.210.017.657,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;	
1. Semula	Rp. 1.394.623.590.649,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 237.255.883.918,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp. 1.631.879.474.567,00
b. Belanja Modal;	
1. Semula	Rp. 541.079.565.475,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 389.490.047.494,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 930.569.612.969,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1. Semula	Rp. 13.661.121.268,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.338.878.732,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 80.000.000.000,00
d. Belanja Transfer;	
1. Semula	Rp. 292.479.388.434,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>9.600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp. 302.079.388.434,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 556.265.605.151,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.383.077.464,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp. 600.648.682.615,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 780.531.701.995,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 177.256.847.408,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp. 957.788.549.403,00
c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 52.803.843.503,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.003.899.046,00</u>
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp. 66.807.742.549,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 4.105.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.529.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
Setelah Perubahan	Rp. 6.634.500.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp. 4.281.336.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.863.367.300,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah	
Setelah Perubahan	Rp. 19.144.703.900,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp. 58.510.097.321,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 225.461.907.165,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan	
Setelah Perubahan	Rp. 283.972.004.486,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1. Semula	Rp. 118.603.977.413,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.210.030.173,00</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan	Rp. 126.814.007.586,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp. 356.299.422.825,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 140.732.824.526,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Setelah Perubahan	Rp. 497.032.247.351,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. Semula	Rp. 3.384.731.316,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 221.918.330,00</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 3.606.649.646,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 13.661.121.268,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.338.878.732,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 80.000.000.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 123.795.514,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 123.795.514,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 292.355.592.920,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 301.955.592.920,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 88.432.043.800,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>620.705.948.264,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 709.137.992.064,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 12.175.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 12.175.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp. 87.432.043.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>620.705.948.264,00</u>

Jumlah SiLPA

Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 708.137.992.064,00
------------------------------------	------------------------

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
-----------------------------------	----------------------

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp. 10.175.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah

Perubahan	Rp. 10.175.000.000,00
-----------	-----------------------

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah

Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
-----------	----------------------

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya

dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 21 Oktober 2021

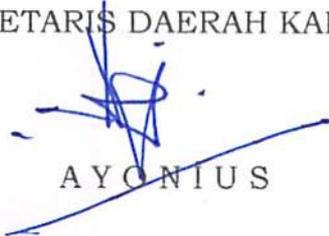
BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

A handwritten signature in blue ink is written over the name 'AYONIUS'. The signature is stylized and somewhat illegible, but it clearly overlaps the printed name.

AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.07/III/37/4/2021